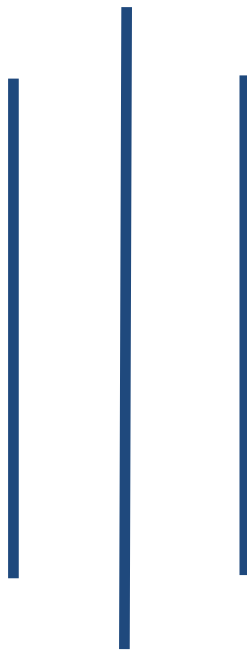




**LAKIP
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2017**



KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPKD
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pertanggungjawaban tersebut diatas selanjutnya disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum bidang pemerintahan umum, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Kedudukan

- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah.
- 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Fungsi

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat 1 ,Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai **fungsi** :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelola keuangan dan asset daerah.
 - Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengelola keuangan dan asset daerah..
 - Pembinaan unit pelaksanaan teknis, Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - Penggunaan Anggaran Dinas

- Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2015, struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (Empat) Bidang, Sekretariat dibantu 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang dibantu 3 (Tiga) Kasubid.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Anggaran

- Kasubid Evaluasi Anggaran
- Kasubid Penyusunan Anggaran
- Kasubid Perencanaan dan Kebijakan Anggaran

d. Bidang Perbendaharaan

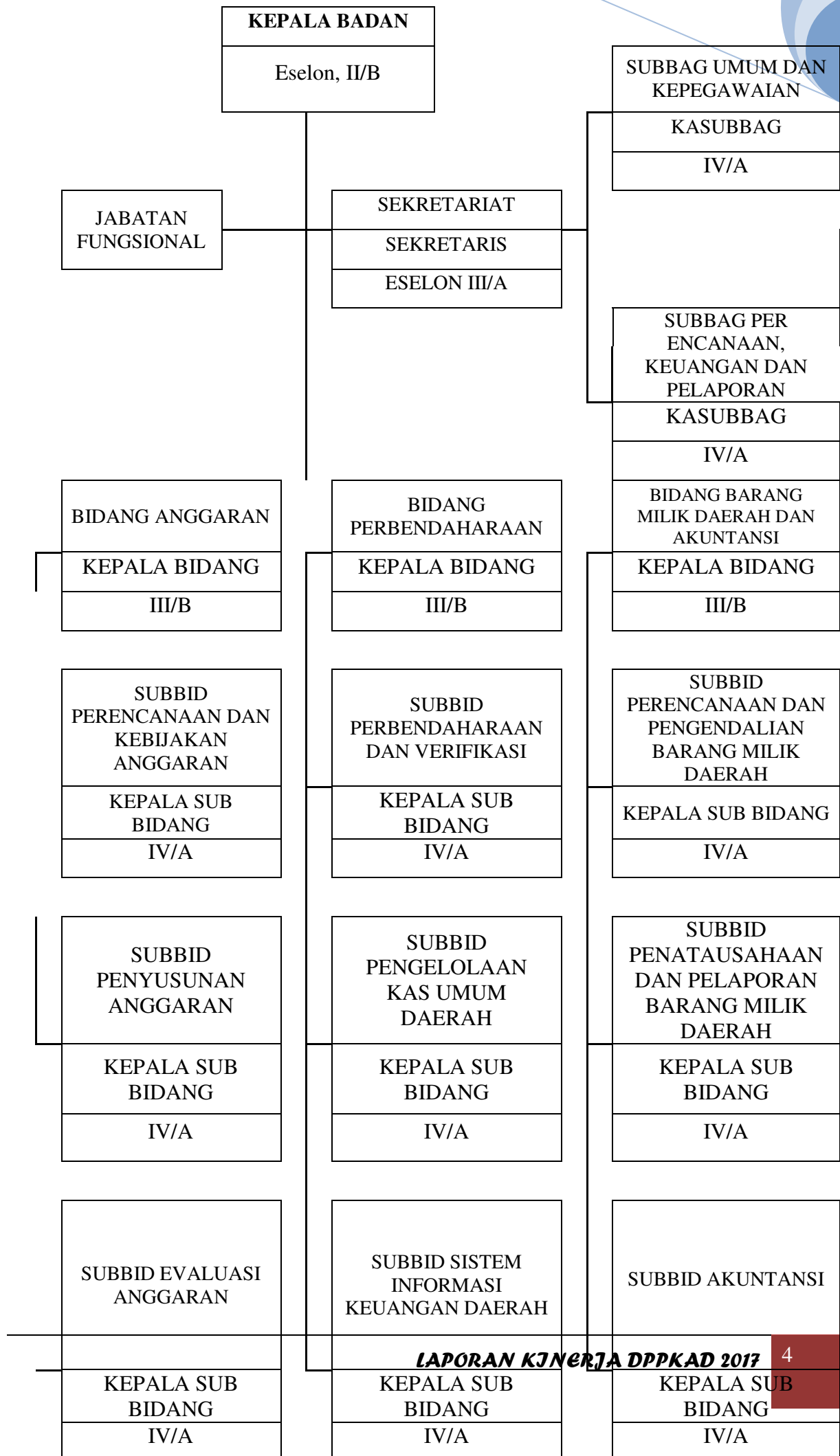
- Kasubid Perbendaharaan dan Verifikasi
- Kasubid Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Kasubid Pengelolaan Kas Umum Daerah

e. Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi

- Kasubid Perencanaan dan Pengendalian BMD
- Kasubid Penatausahaan dan Pelaporan BMD
- Kasubid Akuntansi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

2017



C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum bidang pemerintahan umum, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKD masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan instrumen (ASB dan SPM) perencanaan penganggaran dalam penyusunan anggaran
2. SDM petugas pengelola keuangan daerah perlu ditingkatkan
3. Verifikator OPD belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
4. Masih terdapat kesalahan input data dalam SIPKD Jaringan internet yang belum lancar/trouble di OPD
5. Proses pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintahan Daerah kedepan juga dikembangkan melalui elektronik audit (e-audit) hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk terus mengembangkan proses pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.
6. Terdapat aset tanah yang belum bersertifikat.
7. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan terhadap regulasi pengelolaan keuangan belum memadai hal ini disebabkan salah satunya sering terjadi perubahan regulasi.
8. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah masih kurang memadai.
9. Sebagian SDM pelayan publik kualifikasinya belum sesuai dengan kebutuhan.
10. Masih belum optimalnya proses penatausahaan aset milik daerah dan inventarisir barang milik daerah.

D. ISU STRATEGIK

Sebelum menyusun program dan menjabarkan program dalam bentuk kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. mempersiapkan isu strategis yang berkembang tentang masalah pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut ;

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah
- b. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah
- c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan daerah
- d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat
- f. Perbaikan sistem pengendalian internal
- g. Peningkatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal Badan pengelola Keuangan Daerah, atau koordinasi dan konsultasi lintas OPD
- h. Peningkatan pembinaan OPD terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan tertib administrasi barang milik daerah.

2. Pengelolaan Aset

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang milik daerah
- b. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan barang milik daerah
- c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan barang milik daerah
- d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah
- e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam penyusunan laporan aset daerah yang cepat, tepat dan akurat
- f. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan barang milik daerah
- g. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pada OPD terhadap pengelolaan barang milik daerah
- h. Penilaian dan Pendataan Aset harus lebih professional dan berkelanjutan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Berdasarkan urusan dan program pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah mengacu pada misi 1 (pertama) yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 yaitu :

MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran BPKD

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Taat Azas	Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	WTP

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2017 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2017 meliputi 4 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut

Sebagai fungsi dari Pelayanan Umum, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Wajib pemerintah dibidang Pemerintahan Umum, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuat program-program kerja sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program kerja tersebut dijabarkan secara teknis dan sistimatis dalam bentuk kegiatan, sehingga sasaran dan tujuan yang digariskan mencapai sasaran sesuai dengan bidang urusan dan fungsi organisasi pemerintahan yang diemban.

Dalam tahun 2017 ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan limpahan program-program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut urusan Wajib sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 6) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Festival langkisau
- 7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 10) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2015	Target Kinerja Tahun ke					
					I (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	5 (2021)
1	2	3			5	6	7		8	9
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Mewujudkan Tersusunnya APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Tepat Waktu	Terlaksananya Proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administri Aset Barang Miik Daerah	01.Penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Slatan 02. Jumlah Terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD			01. 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 02. Jumlah terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD	01. 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 02. Jumlah terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD	01. 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 02. Jumlah terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD	01. 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 02. Jumlah terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD	01. 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 02. Jumlah terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD
3.	Mewujudkan Administrasi tepat waktu dan pelayanan yang transparan	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien yang pada Badan Pengelola	01.Persentase pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan			01.100% 02. 8 Dokumen (Neraca, LRA, LO, CALK, RKA, DP,	01.100% 02. 8 Dokumen (Neraca, LRA, LO, CALK, RKA, DP,	01.100% 02. 8 Dokumen (Neraca, LRA, LO, CALK, RKA, DP, LAKIP dan	01.100% 02. 8 Dokumen (Neraca, LRA, LO, CALK, RKA, DP, LAKIP dan	01.100% 02. 8 Dokumen (Neraca, LRA, LO, CALK, RKA, DP, LAKIP dan

		Keuangan Daerah	02.Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu			LAKIP dan Perjanjian Kinerja)	LAKIP dan Perjanjian Kinerja)	Perjanjian Kinerja)	Perjanjian Kinerja)	Perjanjian Kinerja)
4.	Terwujudnya sistem kerja yang professional dengan didukung oleh sarana,prasarana dan SDM yang berkualitas	Tersedianya tenaga aparatur pengelola keuangan yang profesional pada badan pengelola keuangan daerah	Persentase aparatur pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan			65%	65%	65%	65%	65%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing

Adapun pencapaian kinerja sasaran yang dikelompokkan berdasarkan misi pembangunan daerah dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 6) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Festival langkisau
- 7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 8) Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 10) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keangan Desa/Nagari

indikator kinerja sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Target Kinerja Sasaran				
				Satuan	Tahun 2017	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Predikat
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan OPD sudah sesuai/berdasarkan SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sangat Berhasil
2.	Terlaksananya Proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administrasi Aset Barang Milik Daerah	01.Penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Selatan	01.Tersusunnya APBD 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran	01. %	01.100	01.100	01.100	Sangat Berhasil
		02. Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD	02. sudah terlaksananya Administrasi Aset BMD	02. %	02. 100	02.100	02.100	
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien yang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	01.Persentase pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan	01.Terlaksananya administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan sesuai SOP	01. %	01. 100	01.100	01.100	Sangat Berhasil
		02.Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	02.Terwujudnya pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	02. %	02. 100	02.100	02.100	

4.	Tersedianya tenaga aparatur pengelola keuangan yang profesional pada badan pengelola keuangan daerah	Persentase aparatur pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan	Terlaksananya administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan sudah sesuai prosedur	%	100	100	100	Sangat Berhasil
----	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----------------

A.2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2015 dan 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra Tahun 2011-2015 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya..

N O	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITU NGAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017
1	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berdasarkan SAP	WTP	WTP	WTP
2	Terlaksananya Proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administri Aset Barang Miik Daerah	01.Penyusuna n APBD Kabupaten Pesisir Slatan	01.Tersusun nya APBD 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran	01. %	01. 100	01. 100
		02.Persentase Terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD	02. sudah terlaksanan ya Administras i Aset BMD	02. %	02. 100	02. 100
3	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien yang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	01.Persentase pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan	01Terlaksananya administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan sesuai SOP	01. %	01. 100	01. 100

		02.Persentase dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	02.Terwujudnya pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	02. %	02. 100	02. 100	
4	Tersedianya tenaga aparatur pengelola keuangan yang profesional pada badan pengelola keuangan daerah	Persentase aparatur pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan	Terlaksananya administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan sudah sesuai prosedur	%	100	100	

A.3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 (akhir periode Renstra)

Indikator kinerja sasaran Tahun 2017 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun pertama (2016) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2021) untuk mengetahui kemampuan BPKD selama 5 tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016 dan Target Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUGAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016
1	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berdasarkan SAP	WTP	WTP	WTP
2	Terlaksananya Proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administri Aset Barang Miik Daerah	01.Penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Slatan	01.Tersusunnya APBD 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran	01. %	01. 100	01. 100
		02. Jumlah Terlaksananya Tertib Administrasi Aset BMD	02. sudah terlaksananya Administrasi Aset BMD	02. %	02. 100	02. 100
3	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien yang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	01.Persentase pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan	01Terlaksananya administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan sesuai SOP	01. %	01. 100	01.100
		02.Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	02.Terwujudnya pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	02. %	02. 100	02.100
4	Tersedianya tenaga aparatur pengelola keuangan yang profesional	Persentase aparatur pelaksanaan administrasi dan pelayanan	Terlaksananya administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur	%	100	100

	pada badan pengelola keuangan daerah	tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan	Pengelola Keuangan sudah sesuai prosedur			
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

A.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

A.4.1. Sasaran 1 :

“Tersusunnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel” Hasil evaluasi capaian kinerja **Tersusunnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel** melalui 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar WTP dengan predikat sangat berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	TINGKAT CAPAIAN 2017
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan analisis terhadap predikat laporan keuangan daerah dengan target tahun 2017 WTP dan realisasi WTP.

Faktor pendorong keberhasilan – keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Penyusunan laporan keuangan OPD tepat waktu
2. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

1. Masih kurangnya SDM ASN pada OPD dalam penyusunan laporan keuangan

Upaya perbaikan :

1. Diadakan Bimtek terhadap PPK dan Bendahara seluruh OPD untuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

A.4.2. Sasaran 2 :

“Terlaksananya proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administrasi Aset Barang Milik Daerah” Hasil evaluasi capaian kinerja **Terlaksananya proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administrasi Aset Barang Milik Daerah** melalui 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Realisasi indikator 1 sasaran 2 dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	TINGKAT CAPAIAN 2017
Penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan analisis terhadap Penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tepat Waktu dengan target tahun 2017 100% dan realisasi 100%.

Faktor pendorong keberhasilan – keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Penyusunan RKA OPD tepat waktu
2. Penyusunan DPA/RKA dengan berbasis aplikasi SIPKD
3. Penyusunan perencanaan yang sudah memakai aplikasi e-planing

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

1. Tidak dibenarkan lagi jika adanya kegiatan yang perencanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ada di e-planing, karena hal ini akan mengakibatkan penyusunan APBD terlambat/tidak tepat waktu

Upaya Perbaikan :

1. Diadakan Sosialisasi penyusunan APBD baik berupa sosialisasi dan surat edaran tentang prosedur dan peraturan dalam penyusunan RKA yang menghasilkan APBD

Realisasi indikator 2 sasaran 2 dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	TINGKAT CAPAIAN 2017
Persentase terlaksananya tertib Administrasi Aset Daerah	100%	100%	100%

Berdasarkan analisis terhadap Jumlah terlaksananya tertib Administrasi Aset Daerah dengan target tahun 2017 100% dan realisasi 100%.

Faktor pendorong keberhasilan – keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Melakukan Rekonsiliasi penatausahaan dan Administrasi Aset dengan OPD, UPTD dan unit instansi lainnya
2. Meninjau langsung kepada seluruh OPD, UPTD dan unit instansi lainnya mengenai penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah
3. Melakukan penginputan penetausahaan dan pertanggungjawaban aset berbasis aplikasi SIPKD

Catatn penting dalam pencapaian sasaran :

1. Masih kurangnya kemampuan SDM OPD dalam pelaksanaan penatausahaan Aset Barang Milik Daerah (BMD)

Upaya Perbaikan :

1. Diadakan Sosialisasi tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban tertib Administrasi Aset Daerah (BMD)

Realisasi indikator 1 sasaran 3 dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	TINGKAT CAPAIAN 2017
Persentase pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sisitem dan Prosedur pengelolaan keuangan	100%	100%	100%

Berdasarkan analisis terhadap Persentase pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dengan target tahun 2017 100% dan realisasi 100%.

Faktor pendorong keberhasilan – keberhasilan sasaran ini adalah :

4. Terlaksanannya pelayanan dan administrasi pengelolaan keuangan OPD sesuai Prosedur dan SOP yang sudah ditetapkan
5. Terlaksanannya penatausahaan pengelolaan keuangan dengan basis aplikasi SIPKD
6. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dalam penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada

Catatn penting dalam pencapaian sasaran :

1. Tenaga verifikator OPD belum optimal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

Upaya Perbaikan :

1. Mengadakan penambahan tenaga pengelolaan keuangan yang kompeten di bidang penatausahaan pengelolaan keuangan dan Verifikator

Realisasi indikator 2 sasaran 3 dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	TINGKAT CAPAIAN 2017
Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan BPKD yang dapat diselesaikan tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Berdasarkan analisis terhadap Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan BPKD yang dapat diselesaikan tepat waktu dengan target tahun 2017 8 dokumen dan realisasi 100%.

Faktor pendorong keberhasilan – keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Tersusunnya Laporan keuangan OPD 8 dokumen (Neraca, LRA, LO, CALK, RKA,LPE, LAKIP dan Perjanjian Kinerja) dengan tepat waktu
2. Melakukan Konsultasi dan koordinasi pada yang terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKD

Catatn penting dalam pencapaian sasaran :

1. Kurangnya tenaga SDM dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan OPD

Upaya Perbaikan :

2. Mengadakan penambahan tenaga pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan OPD lingkup BPKD

Realisasi indikator 1 sasaran 4 dengan uraian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	TINGKAT CAPAIAN 2017
Persentase tenaga aparatur pengelola keuangan yang professional pada badan pengelola keuangan daerah	65%	65%	100%

Berdasarkan analisis terhadap Persentase tenaga aparatur pengelola keuangan yang professional pada badan pengelola keuangan daerah dengan target tahun 2017 65% dan realisasi 100%.

Faktor pendorong keberhasilan – keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1. Terdapatnya ASN pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang system dan prosedur pengelola keuangan
- 2. Terdapatnya ASN yang sudah berpengalaman mengenai pengelolaan keuangan

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- 1. Masih kurangnya tenaga SDM dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan

Upaya Perbaikan :

- 1. Dilakukan penambahan tenaga dengan melakukan usulan permintaan staf ke BPKDSDM untuk tenaga administrasi dan pelayanan tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan

A.5. Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Rencana pembiayaan dalam pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran Tahun 2017 sebesar Rp. 10.603.822.966,- dengan realisasi Rp. 9.344.908.495 atau 88,13% , masuk kategori **efisien**.

Tabel
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran	Rata-rata capaian kinerja	Keterangan
Tersusunnya Laporan Keuangan yang	333.793.608	287.657.414	86,18%	100%	Efisien

Transparan dan Akuntabel					
Terlaksananya Proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan Tertib Administrasi Aset Barang Milik Daerah	2.361.698.548	2.074.055.600	87,82%	100%	Efisien
Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien yang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	2.361.698.548	2.074.055.600	87,82%	100%	Efisiensi
Tersedianya tenaga aparatur pengelola keuangan yang profesional pada badan pengelola keuangan daerah	5.378.112.948	4.772.279.252	88,74%	100%	Efisiensi

B. Realisasi Anggaran

Sesuai APBD Tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan Daerah mengelola anggaran sebesar Rp. 17.382.874.452,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.779.051.486,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 10.603.822.966. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Realisasi keuangan sebesar 88,13% dengan penyerapan dana sebesar Rp 9.344.908.495. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, BPKD melaksanakan 10 program dan 46 kegiatan.

Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2017 adalah realisasi fisik sebesar 99,96%, karena adanya 1 (satu) output pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional yang tidak dapat dilaksanakan yaitu yaitu belanja kendaraan roda 2 karena blum terbitnya daftar harga belanja pada e – katalog dan belanja perjalanan dinas untuk penjemputan mobil bantuan/hibah dari jepang.

Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2017

Sasaran	Indikator Sasarn	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Reaisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
Tersusunnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	161.661.000	126.745.453	78,40
		2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	74.398.400	64.066.798	86,11
		3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	97.734.208	96.845.163	99,09

Terlaksananya Proses APBD Kabupaten Pesisir Selatan tepat waktu dan tertib administrasi aset barang milik daerah	1.Penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tepat Waktu	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		1. Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	66.951.752	66.336.200	99,53
		2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	231.697.516	204.161.905	88,12
		3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	186.471.366	170.207.870	91,28
		4. Penyusunan Rancangan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	166.897.528	138.749.481	83,13
		5. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	160.731.808	127.085.420	79,07
		6. Penyusunan DPA SKPD	105.566.752	101.124.203	95,79
		7. Penyusunan DPA Perubahan SKPD	99.797.296	98.945.800	99,15
		8. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	132.636.452	123.404.652	93,04
		9. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018	109.432.428	81.482.275	74,46

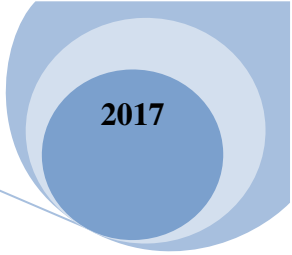
		10. Analisa standard belanja kabupaten pesisir selatan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penghapusan Barang-barang Inventaris 2. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 3. Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang	57.205.764 239.022.530 176.530.000 57.205.764 127.239.028	31.474.635 171.626.515 138.861.209 69.848.860 174.254.396	55,02 71,80 78,66 54,90 88,92
	2.Jumlah terlaksananya tertib administrasi aset BMD				

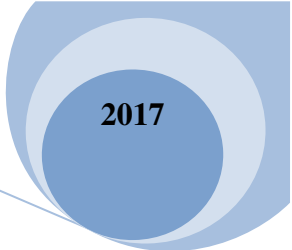
			195.965.008		71,80
			239.022.530	171.626.515	78,66
				138.861.209	78,08
				64.148.612	
Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pelayanan public yang berkualitas, transparan, efektif dan efeisien pada badan pengelola keuangan daerah	1.Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan	1.Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD 3. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah 4. Pengelolaan Dana Hibah dan bantuan Sosial Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1. Asistensi	391.791.488 110.473.416 62.402.612 68.467.660 137.367.688	337.715.158 104.731.344 48.522.501 64.175.324 126.221.522	86,20 94,80 77,76 93,73 91,89

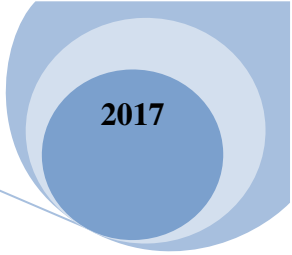
		Penataan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari 1. Pembinaan dan pengelolaan Keuangan nagari 2. TOT Aplikasi Simda Desa 3. Monitoring dan Evaluasi dana transfer ke nagari	49.043.232 94.375.056 100.938.446	41.652.586 90.807.886 91.244.960	17,05 96,22 90,40
	2. Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik 1. Penunjang Operasional perencanaan dan pelaporan	49.330.296	46.880.699	95,03
Tersedian ya tenaga aparatur pengelola keuangan yang profession al pada badan pengelola keuangan daerah	Persentase aparatur pelaksanaan administrasi dan pelayanan tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	169.560.000 270.164.952 153.750.000 46.309.452 34.895.900	151.762.440 255.502.294 148.653.650 46.277.573 34.865.536	89,50 94,57 96,69 99,93 99,91

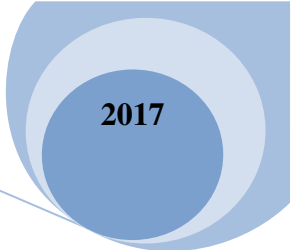
		3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.527.000	14.369.520	98,92
		4. Penyediaan Alat Tulis Kantor			
		5. Penyediaan Barang Cetak dan	17.420.000	6.310.000	36,22
		6. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan bangunan kantor	291.882.250	291.194.102	99,76
		7. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	62.338.600	58.461.974	93,78
		8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	145.250.000	128.838.700	88,70
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	110.500.000	106.535.000	96,41
			259.250.000	246.286.780	96,41
		10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	27.000.000	22.930.000	84,93
		11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		142.446.442	88,62
			160.740.300		88,62
		12. Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor		142.446.442	
		13. Pengadaan Moubiler	19.700.000	19.695.000	99,97
			4.655.672.648		88,18
		14. Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas operasional		4.105.547.330	
		15. Pemeliharaan Rutin Berkala	145.250.000		88,70

		Perlengkapan Gedung Kantor		128.838.700	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
		1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.600.000	85.313.657	5,66
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		1. Pelaksanaan Festival Langkisau	15.000.000	14.802.291	98,68
		Total	10.603.822.966	9.344.908.495	88,13









1. Visi dan Misi

- a. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

“Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Akuntabel”.

- b. Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat sasaran dan terukur.
2. Menghimpun dan meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor bagi hasil pajak, sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan daerah dengan tingkat efektifitas dan efesiensi yang tinggi.
3. Pengelolaan kekayaan/asset daerah secara transparan, akuntabel dan terinventarisir yang dapat bernilai jual.
4. Membuat Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan atas penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

2. Tujuan dan Sasaran

Berangkat dari Visi dan Misi yang diemban Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan dan peningkatan penerimaan daerah, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

a. Tujuan.

Tujuan adalah sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, adalah:

1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
2. Merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan potensi daerah.
3. Menggali potensi pendapatan daerah melalui studi dan identifikasi objek pendapatan daerah dengan didukung system pemungutan pendapatan daerah yang efisien dan efektif.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kekayaan/asset daerah sehingga dapat bernilai ekonomis, bedaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Memberikan informasi keuangan daerah, tepat waktu, relevan, dapat dimengerti dan akuntabel.

b. Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil tersebut harus dirumuskan dengan baik, spesifik, terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur.
2. Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif serta terencana dan akuntabel.
3. Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadual dengan baik.
4. Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik.
5. Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan
6. Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset daerah.
7. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah
8. Terlaksananya laporan pertanggung jawaban pekasanaan APBD

- Program Untuk Mencapai Sasaran.

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang yang telah di tetapkan dalam Renstra, di jabarkan melalui perumusan program prioritas SKPD Sekretariat Daerah. Adapun program program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel Program :

No.	Sasaran	Didukung jumlah program
1	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur.	4
2	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif serta terencana dan akuntabel.	2
3	Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadwal dengan baik.	1
4	Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik.	1

5	Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan	1
6	Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset daerah.	1
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah	1
8	Terlaksananya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1

- **Program yang Mendukung Sasaran Startegis**

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan administrasi keuangan.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan makan dan minum
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD
12. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

V. Progam Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Standar Satuan Harga
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2017
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2017
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2016
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016
6. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Penyusunan rancangan Peraturan tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Penyusunan DPA SKPD
9. Penghapusan Barang-barang Inventaris
10. Penyusunan DPA Perubahan SKPD
11. Penunjang sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2016
13. Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD 2016
14. Penyusunan Laporan PAD
15. Cetak massal dan pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2
16. Pengadaan Barang Kuasi
17. Monitoring dan Evaluasi PBB-P2
18. Pendataan dan Verifikasi nomor objek pajak PBB-P2
19. Penunjang Sistem e-PAD
20. Pengelolaan Penatausahaan Gaji PNSD
21. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
22. Monitoring dan Evaluasi PAD
23. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah
24. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya
25. Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah
26. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
27. Pendataan ulang objek pajak PBB-P2
28. Pemutakhiran data piutang PBB-P2
29. Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

VI. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016
2. Asistensi penataan keuangan daerah
3. Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
4. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

VII. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

1. Pembinaan Pengelolaan keuangan Nagari
2. Monitoring dan Evaluasi dana transfer ke nagari
3. TOT Aplikasi Simda Desa (Nagari)

VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pegendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah

IX. Program penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan Tanah Pemerintah Daea

1. Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra

Adapun Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 adalah

Tabel
Indikator Sasaran dari Visi dan Misi Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015

No.	Sasaran	Indikator	Target 2016
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan PAD pertahun	15%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan tersusunnya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan	95%
4.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum lainnya untuk	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah	100%

	memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah		
5	Tersedianyan tenaga aparatur pengelolaan keuangan yang profesional	Tingkat kinerja Aparatur	100%

Sumber: Renstra DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

- **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel
Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

No .	Indikator	Satuan	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Target 2021
1	Penyusunan Anggaran tepat waktu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	Hasil Pemeriksaan BPK (OPIN I BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3. Penetapan Kebijakan

Guna tercapaian kelancaran dan terpadu dalam mewujudkan sasaran dan tujuan serta visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan serta petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan pelayanan aministrasi kantor dan pengelolaan keuangan daerah sesuai Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan / pengelolaan keuangan daerah secara vertikal dan horizontal.
3. Peningkatan peralatan/perlengkapan kantor dan aset daerah
4. Melakukan disiplin dan mendidik tenaga terampil dibidang pajak/ retribusi dan administrasi keuangan daerah dan Aset.
5. Peningkatan Perencanaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban APBD yang terukur, tepat waktu dan akuntabel.
6. Melakukan pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PBB perkotaan/pedesaan.

4. Penetapan Program

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Umum, sesuai dengan bidang urusan tersebut maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai Pelayanan Umum pemerintahan.

Sebagai fungsi dari Pelayanan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Wajib pemerintah dibidang Pemerintahan Umum, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuat program-program kerja sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program kerja tersebut dijabarkan secara teknis dan sistimatis dalam bentuk kegiatan, sehingga sasaran dan tujuan yang digariskan mencapai sasaran sesuai dengan bidang urusan dan fungsi organisasi pemerintahan yang diemban.

Dalam tahun 2016 ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan limpahan program-program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Urusan Wajib

- 11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 13) Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur
- 14) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 17) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
- 18) Program Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

19) Program Penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah pemerintah daerah

5.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan dengan Bupati sebagai Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Penetapan Kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut

Tabel
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur.	terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	SKPD	43
2	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif serta terencana dan akuntabel.	Penyusunan APBD Tepat Waktu	Waktu	30 Desember tahun berjalan
3	Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadwal dengan baik.	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	91,92

4	Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik.	Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terealisasi sesuai dengan Target	%	100
5	Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan	Terlaksananya Penerimaan PBB	%	100
6	Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset daerah.	Tercapainya Inventarisasi Aset	Buku	558
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah	Opini terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah oleh BPK	Opini	Mempertahankan WTP
8	Terlaksananya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang handal dan Akuntabel	Waktu	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A.CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang berisikan visi misi Bupati terpilih, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjalankan sasaran strategis sesuai dengan misi 3 yakni *“Revitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat”*. Sasaran strategis tersebut adalah ;

1. Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur
2. Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien, efektif serta terencana dan akuntabel
3. Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efisien, efektif serta terjadual dengan baik
4. Terkoordinasinya Penerimaan Pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baiak
5. Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan
6. Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset daerah
7. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah
8. Terlaksananya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

2.EVALUASI KINERJA

Metode pengukuran kinerja adalah capaian dari indikator keluaran pada masing-masing kegiatan sesuai dengan rencana target keluaran yang direncanakan pada setiap kegiatan. Indikator Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan target kinerja yang ditetapkan berdasarkan kepada indikator tolak ukur kinerja kegiatan dan merupakan indikator-indikator capaian program, masukan, keluaran dan hasil. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, digunakan skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal seperti berikut :

- | | |
|------------|-------------------|
| 85 s/d 100 | = Sangat berhasil |
| 70 s/ d 85 | = Berhasil |
| 55 s/d 70 | = Cukup berhasil |
| < 55 | = Tidak berhasil |

Berdasarkan sasaran tersebut di atas dan metode pengukuran kinerja, maka capaian indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKAD pada tahun 2016, dari 8 (Delapan) sasaran strategis yang dilaksanakan dengan 8 buah indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hanya 1 (satu) yang tidak terlaksana yaitu

Kegiatan Cetak Masal dan Pengadaam Bahan-bahan Baku kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pada saat pembentukan OPD baru sesuai dengan Perda Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 yang mana pada kegiatan ini direncanakan untuk pengadaan cetak dokumen DHKP, SPPT dan STTS namun adanya pemecahan OPD dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini

Adapun pencapaian kinerja sasaran yang dikelompokkan berdasarkan misi pembangunan daerah dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Program-program yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis adalah :

- 1) Progam Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja.
- 2) Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 6) Program Penataan Penguasaan, pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

INDIKATOR	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	Opini belum dikeluarkan	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2016,masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

3.ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 8.187.459.349,- dan terealisasi Rp.6.943.437.561,- atau tingkat penyerapannya yaitu 84,81%.

Tabel

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2016

**PENGUKURAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	7	8	9
1	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur.	Terwujudnya tertib Administrasi Pengelolaan keuangan Daerah	SKPD	43	42	100.00
2	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien efektif serta terencana dan Akuntabel	Penyusunan APBD Tepat waktu	Waktu	30 Des tahun berjalan	30 Desember tahun berjalan	100.00
3	Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efisien,efektif serta terjadwal dengan baik	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	100.00	91,92	91,92
4	Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik	Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terealisasi sesuai dengan Target	%	100.00	99.02	99.02

5	Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan	Terlaksananya Penerimaan PBB	%	100.00	40.42	40.42
6	Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan/Aset Daerah dan Kebutuhan Aset Daerah	Tercapainya Inventarisasi Aset	buku	558	558	100.00
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	Opini belum dikeluarkan	-
8	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang han dal dan Akuntabel	Waktu	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Masih dalam pelaksanaan	-

-CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

SASARAN I

Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur

Pengelolaan Administrasi keuangan daerah merupakan salah satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan daerah,sejalan dengan hal tersebut,berbagai perundang-undangan dan produk hukum .

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% di tahun 2016 dan 100% di tahun 2015 dengan predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran capaian kinerja sasarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

N	SASARAN	INDIKAT	SAT	TAHUN 2015	TAHUN 2016
---	---------	---------	-----	------------	------------

O	STRATEGIS	ORKINERJA	UAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9
1	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur.	Terwujudnya tertib Administrasi Pengelolaan keuangan Daerah	SKPD	42	42	100.00	43	43	100.00
		<i>Rata-rata</i>							<i>100.00</i>

SASARAN 2

Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien, efektif serta terencana dan akuntabel

Sasaran ini bertujuan agar tersusunnya APBD tatap waktu dan tepat saji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan efisien,ekonomis,efektif,bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan ,kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,tepat waktu ,sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai tanggal 31 Desember ,APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara,APBD,Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah,dalam menyusun APBD,Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hasil pengukuran capaian kinerja sasarnya adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9

2	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien efektif serta terencana dan Akuntabel	Penyusunan APBD Tepat waktu	Waktu	Per 30 Des tahun berjalan	Per 30 Des tahun berjalan	100.00	Per 30 Des tahun berjalan	Per 30 Des tahun berjalan	100.00
		<i>Rata-rata</i>							<i>100.00</i>

SASARAN 3

Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadual dengan baik

Pada dasarnya,pengeloaan pendapatan daerah adalah bagian dari integral dari pengelolaan APBD dalam setiap tahun anggaran.Demikian halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen dalam pendapatan daerah,selain dari pengelolaan belanja dan pembiayaan,pengelolaan pendapatan adalah bagian integral dalam pengelolaan APBD.

Untuk jenis PAD yang kelola/dipungut oleh SKPD lain,DPPKAD hanya menerima laporan bulanan yang kemudian direkap sebagai bahan pembahasan dalam rapat evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan.Sebelum pelaksanaan pemungutan/penagihan .terlebih dahulu dilaksanakan pendaftaran dan penetapan wajib pajak dan retribusi.Dalam setiap tahun ada monitoring di lapangan yang dilakukan DPPKAD untuk mengindentifikasi sumber-sumber PAD.Monitoring ini adalah pendataan awal,misalnya monitoring terhadap secteor paja reklame.Semua pengusaha yang memasang papan reklame akan didaftar sebagai subjek pajak dan reklame sebagai objek pajak.Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi hanya dilakukan ketika wajib pajak sudah tetap.Misalnya,untuk sector pajak vahan galiane golongan C,wajib pajaknya hanya boleh didaftar ketika terjadi transaksi.Transaksi yang dimaksud adalah proses jual beli bahan galian itu.

Setelah pendaftaran juga dilakukan penetapan wajib pajak dan retribusi.Adapun penetapan pajak dan retribusi daerah itu ada dua macam yaitu penetapan nilai transaksi dan penetapan secara jabatan.Penetapan nilai transaksi,maksudnya adalah pemberlakuan pengenaan nominal pajak secara normal dengan peraturan yang berlaku,misalnya,sector pajak hotek hotel.Setiap pengunjung dikenakan biaya 10% dari transaksi.Untuk itu harus dilakukan pengawasan yang ketat karena tidak jarang pengelola hotel juga melakukan kecurangan.Namun kalau penetapan ini tidak berhasil,maka dilakukan penetapan secara jabatan.maksudnya,ada kesepakatan bersama tentang nominal yang harus setor restoran setiap bulan,misalnya Rp. 200.000/bulan.Angka ini

tidak berpatokan pada biaya 10% dari transaksi.Konsekuensinya,sedikit atau banyaknya pengunjung tidak berpengaruh pada nominal itu.

Permasalahannya

- Seksi bidang Pendapatan DPPKAD kurang melakukan Koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup DPPKAD,termasuk kecamatan dan SKPD lain pengelola PAD
- Seksi bidang pendapatan kurang kedisiplinan waktu,kedisiplinan kerja
- kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan

Strategi/Upaya pemecahan

- Seksi bidang pendapatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus tetap melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup DPPKAD termasuk kecamatan dan SKPD lain pengelola PAD,sebab bidang inilah yang paling mengetahui kondisi objektif potensi/sumber PAD yang memungkinkan untuk peningkatkan PAD dalam setiap tahun anggaran.
- Seksi bidang pendapatan Perlu adanya peningkatan kinerja dalam hal kedisiplinan waktu,kedisiplinan kerja,serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan membuka usaha-usaha baru,sehingga target PAD yang ditargetkan pertahun bisa tercapai.
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaranannya adalah sebagai berikut:

**CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIK ATOR KINE RJA	SA TU AN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
				TARGE T	REA LISA SI	CAP AIAN	TAR GET	REA LISA SI	CAP AIAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9

3	Terwujudnya Penerimaan Asli Darah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efisien,efektif serta terjadwal dengan baik	Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	100.00	140.00	140.00	100.00	91.92	91.92
		<i>Rata-rata</i>							<i>91.92</i>

SASARAN 4

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Permasalahannya :

- Kesadaran wajib pajak daerah yang belum maksimal dalam melaporkan objek pajak baru.
- kesadaran wajib pajak yang belum maksimal dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya
- belum lengkap dan akuratnya data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah sehingga belum dapat mengganbarkan potensi yang sebenarnya

Strategi/Upaya Pemecahan

- melaksanakan sosialisasi,pembinaan ,monitoring dan updating objek dan subjek pajak secara terus-menerus.
- melaksanakan pemeriksaan secara periodik setiap triwulan dan penungguan terhadap objek pajak tertentu yang ditenggarai dalam membayar pajaknya tidak sesuai yang seharusnya.
- Memberikan gambaran menyeluruh mengenai data potensi pajak daerah,retribusi daerah maupun pungutan-pungutan lainnya sehingga dapat diketahui seberapa besar sebenarnya potensi pendapatan disuatu daerah yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasarannya adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA SASARAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

N	SASARAN	INDIKAT	SAT	TAHUN 2015	TAHUN 2016
---	---------	---------	-----	------------	------------

O	STRATEGI S	OR KINERJA	U A N	TAR GET	REA LISA SI	CAP AIAN	TAR GET	REA LISA SI	CAP AIAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9
4	Terkoordinas inya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik	Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terealisasi sesuai dengan Target	%	100.00	100.00	100.00	100.00	99.02	99.02
		<i>Rata-rata</i>							<i>99.02</i>

SASARAN 5

Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan

Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan badan kepada daerah tanpa imbalan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada diatasnya yang nilainya diatas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP),pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak.Untuk tecapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan pelayanan secara optimal dengan cara pelayanan optimal dilakukan dengan memberikan pembagian tugas kepada aparat yang berwenang,Tercapainya target penerimaan PBB dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,pelayanan PBB yang meningkat dan pembayaran PBB saat ini dapat dibayar di bank menggunakan sistem online.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah:

- Kesadaran Masyarakat
- Kualitas Pelayanan

Permasalahannya:

- .Belum lengkap dan akuratnya data objek pajak dan subjek pajak
- Kesadaran membayar pajak masih rendah

Strategi/Upaya Pemecahannya

- Menciptakan system informasi pendapatan
- Melakukan penyuluhan secara intensif,terpadu dan berkesinambungan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaranannya adalah sebagai berikut:

**CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9
5	Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan	Terlaksananya Penerimaan PBB	%	100.00	41,59	41,59	100.00	40.42	40.42
		<i>Rata-rata</i>							<i>40.42</i>

SASARAN 6

Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset daerah

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib Administarsi dan tertib pengelolaan barang aset milik daerah .Dalam pengelolaan barang/aset milik daerah ,kepala daerah selaku pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang teknis pengelolaanya dilaksanakan oleh sekretaris daerah sebagai pengelola barang dan kepala satuan kerja daerah selaku pengguna barang.

Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,penghapusan, pemindatanganan ,penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.Sedangkan pentausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan,inventarisasi dan pelaporan.Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan.proses inventarisasi baik berupa pendataan,pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan.Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran,pengguna anggaran dan pengelola barang

Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.Hasil pengukuran capaian kinerja sasarnya adalah sebagai berikut

Tabel

CAPAIAN KINERJA SASARAN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKAT OR KINERJA	SAT UA N	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
				TAR GET	REA LISA SI	CAP AIAN	TAR GET	REA LISA SI	CAP AIAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9
6	Terlaksanan ya Inventarisasi Kekayaan/A set Daerah dan Kebutuhan Aset Daerah	Tercapainay a Inventarisas i Aset	buku	558	558	100.0 0	558	558	100.0 0
		<i>Rata-rata</i>							<i>100.0 0</i>

SASARAN 7

Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah

Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan ,pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu kepada estándar akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan dan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi.Sistem Akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntasi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,pencatatan,pengikhitisan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Tersusunnya Laporan keuangan daerah adalah sejalan dengan Misi mendorong tata kelola pemerintahan yang baik yang menjadi misi ke -4 dalam RPJMD 2010-2015. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK).Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan

mendasarkan pada UU No.15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca,Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas,dan Catatan Laporan Keuangan.Opini yang dihasilkan atas Pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW),Tidak Memberi Pendapat (TMP),Wajar dengan Pengecualian(WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk sasaran ke-7 ini,realisasi target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik,pada tahun 2014,target kinerjanya adalah pemeriksaan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),Dengan status pencapaian opini yang terbaik.Pencapaian ini apabila dipertahankan,capaian ini sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 yaitu opini WTP.Sebagai catatan,sebagaimana realisasi untuk nilai Akuntabilitas kinerja pemerintah di sasaran ke-7,realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemda Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2016.Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2016,masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Permasalahannya :

- Keterbatasan SDM di SKPD yang memahami SAP AkruaI
- Keterbatasan SDM pada Seksi Akuntansi sebagai Tenaga untuk memberikan asistensi PPK SKPD dalam menyusun laporan keuangan
- Sistem Informasi belum sepenuhnya dapat mengkoordinir Implementasi SAP AkruaI

Starategi/Upaya :

- Meningkatkan Frekuensi Pertemuan/Asistensi dengan PPK-SKPD
- Menambah tenaga PNS pada seksi Akuntansi dan Pelaporan
- Memberikan masukan-masukan kepada pengembang SIPKD agar dapat mengkoordinir implementasi SAP berbasis AkruaI

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaraannya adalah sebagai berikut:

**CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATO R KINERJA	SAT U A N	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
				TA R G E T	RE ALI SAS I	CAP AIAN	TA R G E T	RE ALI SAS I	CAP AIAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opin i	WT P	WT P	100.0 0	WT P	Opin i BPK belu m dikel uark	-

								an	
		<i>Rata-rata</i>							

SASARAN 8
Terlaksananya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD , entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi:

- 1.Laporan realisasi Anggaran
- 2.Neraca
- 3.Laporan Arus Kas
- 4.Catatan atas laporan Keuangan
5. Laporan Operasional

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan secara tertib ,taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,efisien,efektif dan transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu,ketentuan ini berarti,bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.dengan demikian pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD,sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasarnya adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKAT OR KINERJ A	SA TU AN	TAHUN 2015			TAHUN 2016		
				T A R G E T	REALI SASI	CAP AIAN	TAR GET	REAL ISASI	CAPA IAN
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9

8	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang handal dan Akuntabel	Waktu	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Masih dalam pelaksanaan	-
		<i>Rata-rata</i>							-

-CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERHADAP TAHUN KE LIMA TARGET RESTRA

Berdasarkan realisasi kinerja serta capaian-capaian tahun sebelumnya terhadap capaian kinerja sasaran Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator kinerja terhadap tahun kelima target Renstra
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKA TOR KINERJ A	SA TU AN	REA LISA SI	REA LISA SI	REA LISA SI	T A R G ET	TAHUN 2016		CA PAI AN
				2013	2014	2015	2016	T A R G ET	RE ALI SAS I	
1	2	3	4					7	8	9
1	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur.	Terwujudnya tertib Administrasi Pengelol aan keuanga n Daerah	SK PD	41	41	42	43	43	43	100.00
2	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien efektif	Penyusu nan APBD tepat Waktu	wa ktu	30 des da;la m waktu berjal an	30 des da;la m waktu berjal an	30 des da;la m waktu berjal an	30 des da;la m wakt u	30 des da;la m wakt u b	30 des da;la m wakt u	100.00

	serta terencana dan Akuntabel						berja lan	erjal an	berja lan	
3	Terwujudnya Penerimaan Asli Darah yang rasional dan terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah yang efisien, efektif serta terjadwal dengan baik	Tercapai nyan target penerima anPenda patan Asli Daerah	%	102,0 4	105,8 3	101,0 2	91.9 2	100	91.0 2	91.0 2
4	Terkoordinasi nya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan baik	Penerima an dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terrealisas i sesuai dengan Target	%	100	100	77.02	99.0 2	100	99.0 2	99.0 2
5	Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan	Terlaksa nanya Penerima an PBB	%	57.77	60	77.02	40.4 2	100	40.4 2	40.4 2
6	Terlaksananya a Inventarisasi Kekayaan/As et Daerah dan Kebutuhan Aset Daerah	Tercapai naya Inventari sasi Aset	Bu ku	556	556	558	558	558	558	558
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuanga n	Op ini	WDP	WDP	WTP	WT P	WT P	Opin i belu m dikel uark an	-
8	Terlaksananya a Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertangg ungjawa ban pelaksan aan	wa ktu	6 bulan setela h tahun angga	6 bulan setela h tahun angga	6 bulan setela h tahun angga	6 bula n setel ah tahu	6 bula n setel ah tahu	Masi h dala m pela ksan	-

		APBD yang han dal dan Akuntab el		ran berak hir	ran berak hir	ran berak hir	n angg aran bera khir	n angg aran bera khir	aan	

-AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2016

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2016 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016, untuk mencapai 8 sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 8.187.459.349,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.943.437.561,- atau 84.81%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut ini.

BAB IV
P E N U T U P

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Perencanaan Strategik terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan implementasinya berupa pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang akuntabel. Pengelolaan pelaksanaan misi yang dilaksanakan melalui sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diadakan pengukuran kinerja. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian yang dilaksanakan melalui proses dari kegiatan dalam mengolah masukan menjadi keluaran atau menilai dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Selanjutnya dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah tahun 2016 dilaksanakan 9 program dan 42 kegiatan. Melalui pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan dari 59 kegiatan mendapat nilai yang sebagian besar dikategorikan berhasil (> 70 %). Keberhasilan tersebut tercapai didahului oleh faktor-faktor pendukung, seperti adanya kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua unsur pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, adanya kerjasama atau koordinasi dengan Badan dan Dinas yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, persiapan kegiatan yang mantap, kelancaran administrasi dan keuangan.

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, nilai rata-rata skor yang diperoleh 84,81% atau dikategorikan berhasil. Dari pengukuran diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pencapaian sasaran dikategorikan sangat berhasil.

Dengan keberhasilan yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sebagai unsur penyelenggara pengelolaan keuangan daerah dalam menunjang pemerintah negara dapat mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja(LKJ) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 ini, hendaknya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Painan, 28 Januari 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KEPALA



SUHANDRI, SE.MM
Nip. 19700608 200212 1 003